



Artikel Penelitian

Article history:

Received 15 January, 2024

Revised 29 January, 2024

Accepted 29 January, 2024

Kata Kunci:

Stakeholder;
Kolaborasi;
Pusat Pembelajaran
Keluarga.

Keywords:

Stakeholders.;
Collaboration.;
Family Learning Center.

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Meilana Tasya
Administrasi Publik, Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hang Tuah

EMAIL

tasyaaiueo@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Analisis Stakeholder dalam Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya

Stakeholder Analysis in the Implementation of Family Learning Center Surabaya City

Meilana Tasya^{1*}, Sasmito Jati Utama²

¹Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah | email: tasyaaiueo@gmail.com

²Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah | email: sasmito.jatiutama@hangtuah.ac.id

Abstrak: Pusat Pembelajaran Keluarga merupakan sebuah program untuk memberikan layanan, promosi, sosialisasi, parenting, bimbingan masyarakat bagi keluarga dan penerimaan, penanganan awal, konseling/konsultasi serta rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berjejaring dengan banyak pihak serta masyarakat pemerhati keluarga khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya. Metode analisis stakeholder yang digunakan adalah MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and Recommendations) dengan pendekatan kualitatif. bahwa stakeholder yang terlibat dalam Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Kota Surabaya meliputi DP3APPKB, Sekda, pihak Kecamatan, pihak Kelurahan, pihak RW, serta akademisi. Langkah strategi stakeholder kunci dapat berupa penentuan kebijakan, pengorganisasian, penyediaan sumber daya, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan pada stakeholder utama dan stakeholder pendukung meliputi koordinasi, sosialisasi, edukasi, publikasi, alokasi sumber daya, serta melaksanakan teknis kegiatan yang menjadi muatan dalam program puspaga. Dalam upaya berjalanya program Puspaga di Kota Surabaya, perlu diterapkan strategi yang mendorong terjalinnya hubungan antar stakeholder saling berkerjasama, saling berkoordinasi dalam menyelesaikan konflik kepentingan. Implementasi strategi tersebut harus dilakukan sepenuhnya oleh stakeholder kunci.

Abstract: The Family Learning Center is a program to provide services, promotion, socialization, parenting, community guidance for families and acceptance, initial handling, counseling / consultation and referral of cases of violence against women and children through networking with many parties and community observers of families, especially women and children. This research aims to conduct an analysis related to the implementation of the Surabaya City Family Learning Center. The stakeholder analysis method used is MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and Recommendations) with a qualitative approach. that stakeholders involved in the Family Learning Center in Surabaya City include DP3APPKB, the Regional Secretary, the Sub-district, the Village, the RW, and academics. Key stakeholder strategy steps can be in the form of determining policies, organizing, providing resources, and conducting monitoring and evaluation. Meanwhile, the main stakeholders and supporting stakeholders include coordination, socialization, education, publication, resource allocation, and carrying out technical activities that are the content of the puspaga program. In an effort to run the Puspaga program in Surabaya City, it is necessary to implement a strategy that encourages the establishment of relationships between stakeholders to work together, coordinate with each other in resolving conflicts of interest. The implementation of these strategies must be carried out fully by key stakeholders.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i2.4779

Pages: 609-620

LATAR BELAKANG

Pusat Pembelajaran Keluarga merupakan sebuah program untuk memberikan layanan, promosi, sosialisasi, parenting, bimbingan masyarakat bagi keluarga dan penerimaan, penanganan awal, konseling/konsultasi serta rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berjejaring dengan banyak pihak serta masyarakat pemerhati keluarga khususnya perempuan dan anak.

Tujuan dari layanan puspaga di Kota Surabaya yaitu: 1) Meningkatkan dan mendekatkan akses pelayanan terkait pembelajaran keluarga dan penanganan terhadap permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak kepada masyarakat; 2) Tersedianya layanan gratis bagi keluarga dalam bentuk "one stop service" yaitu layanan satu pintu keluarga *holistic integratif* berbasis hak anak; 3) Tersedianya tempat untuk mendapatkan layanan informasi, konsultasi, dan konseling bagi anak, orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak; 4) Terciptanya ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak.

Dalam layanan puspaga di Kota Surabaya, terdapat deskripsi terkait waktu pelaksanaan layanan, titik lokasi layanan, proses kegiatan, pendamping, dan fasilitator seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 1. Layanan Puspaga di Kota Surabaya

Layanan Puspaga Kota Surabaya	
Waktu	Selasa dan Kamis (15.00 s/d 17.00)
Titik Lokasi	1156 BALAI RW, 153 Kelurahan 31 Kecamatan
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas parenting: Promosi, sosialisasi / parenting / pembelajaran keluarga kepada para orang tua/warga dan bimbingan masyarakat; 2. Pojok konseling: Penerimaan, penanganan awal, konseling/konsultasi Psikologis terkait permasalahan keluarga/kekerasan terhadap perempuan dan anak, rujukan.
Pendamping	Psikolog Volunteer Puspaga DP3APPKB (15 orang)
Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relawan PKBM Kecamatan; 2. Satgas PPA Kelurahan; 3. Ketua RT/RW dan anggota serta kader Puspaga BALAI RW; 4. Kader KSH, PKK; 5. Mahasiswa volunteer

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Dalam proses pelaksanaan layanan pada Puspaga di Kota Surabaya, terdapat alur pelayanan pada tiap program layanan yang ada pada Puspaga Balai RW di Kota Surabaya yang dimana tiap programnya merupakan sebuah program yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pertama ada Program Kelas Parenting Puspaga Balai RW dengan alur proses pelaksanaan layanan, yaitu: 1) Warga/masyarakat datang ke lokasi Puspaga Balai RW sesuai penjadwalan dari Kecamatan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 15.00 – 17.00; 2) Pemateri adalah dari relawan PKBM, satgas PPA, penyuluh KB, psikolog volunteer, LSM, fasilitator balai RW, mahasiswa, kader ksh, puskesmas, NGO, pemerhati perempuan dan anak, dan terkait tema kelas parenting yang dibutuhkan adalah yang sesuai dengan wilayah tersebut; 3) Pemberian materi; 4) Sesi diskusi dan Tanya jawab; 5) Acara selesai, apabila warga masyarakat memerlukan konseling, maka dapat dilanjutkan di Pojok Konseling Puspaga Balai RW, dan jika tidak ingin lanjut proses konseling maka warga/masyarakat dapat kembali kerumah masing-masing.

Kedua, Program Konseling Puspaga Balai RW dengan alur proses pelaksanaan layanan, yaitu: 1) Warga datang ke Puspaga Balai RW di pojok konseling kemudian mengisi buku tamu, dan pelayanan dilaksanakan setiap hari pukul 08 .00 – 16.00 WIB; 2) Petugas memberikan form persetujuan klien (*informed consent*) kepada klien untuk diisi; 3) Petugas melakukan proses terkait, pengamatan dan

wawancara, konseling awal non-klins dan psikoedukasi tahap dasar, dan petugas mengisi berita acara pendampingan klien; 4) Apabila klien memerlukan konseling psikologi lanjutan, petugas akan menjadwalkan proses konseling lanjutan dengan psikolog volunteer puspaga penanggungjawab wilayah tersebut; 5) Konseling psikologi lanjutan dengan psikologi sesuai jadwal, apabila permasalahan cukup berat, maka di rujuk ke Puspaga Surabaya/UPTD PPA Surabaya/Puskesmas Wilayah terdekat/Intansi lain yang berwenang; 6) Warga membawa form rujukan ke instansi yang di tuju.

Ketiga, Pengaduan Kasus Puspaga Balai RW untuk Fasilitator dengan alur proses pelaksanaan layanan, yaitu: 1) Fasilitator Puspaga Balai RW (yang terdiri dari Babinkamtibmas, Babinsa, Ketua RW, Koordinator Relawan PKBM, Ketua RW, unsur pengurus RW/RT, unsur kader PKK, unsur KSH, unsur relawan PKBM, unsur satgas PPA, unsur Karang Taruna) dan mahasiswa volunteer Puspaga Balai RW menerima pengaduan dari masyarakat; 2) Fasilitator Puspaga Balai RW/Mahasiswa volunteer melaporkan ke WA Group/ Hotline Puspaga dan melakukan entry pengaduan di link: <https://bit.ly/KlienPuspagaRW>; 3) Puspaga DP3APPKB melakukan koordinasi dengan Fasilitator Puspaga Balai RW/Mahasiswa Volunteer/Klien; 4) Puspaga DP3APPKB berkoordinasi dengan mahasiswa Profesi Psikologi (S2/S3) lintas Universitas untuk melakukan penjangkauan dan pendampingan psikologi apabila kasus yang dialami klien cukup berat dan membutuhkan pendampingan khusus yang lebih mendalam; 5) Proses konseling dilaksanakan dengan didampingi oleh Fasilitator Puspaga Balai RW setempat; 6) Mahasiswa Profesi Psikologi (S2/S3) mengisi hasil penjangkauan di link: <https://bit.ly/KLPuspagaRW> ; 7) Apabila klien memerlukan intervensi/pendampingan/*assessment* psikologi lanjutan dengan psikologi, maka Mahasiswa Profesi Psikologi (S2/S3) berkoordinasi dengan Puspaga DP3APPKB untuk fasilitas jadwal dengan Psikolog Volunteer Puspaga; 8) Apabila klien memerlukan pendampingan non-psikologis maka Mahasiswa Profesi Psikologi (S2/S3) berkoordinasi dengan Fasilitator Puspaga Balai RW dan Kelurahan setempat.

Dalam berjalannya Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Balai RW, ada beberapa stakeholder yang turut andil dalam berjalannya program tersebut. Overseas Development Administration dalam (Eyben 2003) dan (Grimble 1998) mendefinisikan analisis pemangku kepentingan sebagai metodologi untuk memperoleh pemahaman atas sebuah sistem dan untuk menilai dampak perubahan pada sistem tersebut, juga sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan pemangku kepentingan kunci tersebut. Oleh karena itu, analisis stakeholder digunakan untuk membantu dalam memahami konflik (Mushove and Vogel 2005). Secara garis besar analisis pemangku kepentingan perlu mengakomodasi beberapa komponen, yaitu: 1) komunitas atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan suatu kegiatan, 2) isu utama berdasarkan pengalaman masyarakat, 3) dampak positif dan negatif kegiatan terhadap mata pencaharian masyarakat, 4) strategi untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif kegiatan, dan 5) implementasi program aksi (Cheng, Millar, and Ju Choi 2006). Sedangkan analisis pertukaran sosial digunakan untuk melihat pola interaksi yang terjadi diantara para pihak (Ilham et al., 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di tulis oleh Priska Grace Filia & Laila Khalid Alfirdaus, menjelaskan bahwasanya relasi antar aktor yang terbentuk tidak lepas dari pasang-surut relasi kolaboratif dan konfliktual. Selalu ada pro dan kontra yang timbul sejak dicetuskannya program Balkondes. Namun, adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian serta kegigihan dari PT. Manajemen CBT Nusantara sebagai BUMN Pendamping mampu meredam konflik-konflik kecil yang sempat timbul. Munculnya masyarakat desa yang berdikari menjadi tujuan bersama jangka panjang dari adanya program Balkondes (Filia and Alfirdaus 2020). Penelitian yang di tulis oleh Hidayatul Fajri, Artha Dini Akmal, dan Pratiwi Nurhabibi, menjelaskan bahwasanya adanya satu pihak yang mendominasi menyebabkan sulitnya mencapai win-win solution dalam konflik ini. Penelitian ini menyarankan adanya forum yang berisikan multi-pihak agar dapat ditemukan solusi yang tidak

menyebabkan adanya pihak yang terlalu dirugikan di dalam suatu konflik (Artha, Akmal, and Nurhabibi 2019).

Berdasarkan penelitian yang di tulis oleh Ferdy Andriyanto & Hartuti Purnaweni, menunjukkan bahwasanya dalam proses perumusan kebijakan Kota Layak Anak yang melibatkan Bappeda, Bapermasper, KB, Yayasan Setara dan KADIN tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dilihat dari komitmen Bappeda, Bapermasper, KB dan KADIN yang belum optimal. Kemudian Bappeda dan Bapermasper dan KB memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar karena memiliki fungsi perencanaan dan perencanaan dan fungsi koordinasi. Yayasan Setara tidak memiliki fungsi perencanaan dan koordinasi (Andriyanto and Purnaweni 2017). Penelitian yang di tulis oleh Muji Listyo Widodo, Rinekso Soekmadib, Hadi Susilo Arifinc, menjelaskan bahwasanya Pemetaan pemangku kepentingan menghasilkan empat pemangku kepentingan sebagai subjek (kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah), enam pemangku sebagai subjek (pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah), enam pemangku kepentingan sebagai pemain kunci (pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi), delapan pemangku kepentingan sebagai penentu konteks (pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah), dan lima pemangku konteks (pengaruh tinggi namun kepentingan rendah), dan lima pemangku kepentingan sebagai kerumunan (pengaruh rendah dan kepentingan rendah). Terdapat tiga hubungan antara masing-masing yang teridentifikasi, yaitu komunikasi, kerjasama, dan koordinasi (Widodo, Soekmadi, and Arifin 2018).

Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Balai RW menjadi sebuah program hajat publik yang memuat banyak kepentingan dan relasi di dalamnya. Analisis stakeholder akan melihat bagaimana peran stakeholder sebagai aktor dalam Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Balai RW kota Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi stakeholders, untuk mengklasifikasikan stakeholders dan untuk menggambarkan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Balai RW kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (F. X. Sugiyono 2017). Penelitian ini dilakukan di Surabaya, yaitu Balai RW 07 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu bulan September – Desember 2023. Tempat dan waktu penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa saat itu dalam pelaksanaan MSIB di Puspaga Balai RW 07 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan responden terpilih, menggunakan metode *purposive sampling* (S. Sugiyono 2016). Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan telaah dokumen dan studi literatur. Informasi yang diperoleh dalam kajian ini dari pihak pengurus RW 07 Kelurahan Mojo, masyarakat dari RW 07 Kelurahan Mojo, serta Fasilitator Puspaga Balai RW 07 Kelurahan Mojo.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah tahapan analisis stakeholder yang meliputi; Identifikasi Stakeholder, Pengelompokan dan Pengkategorian Stakeholder, serta Strategi Pengaturan Pelaksanaan Stakeholder.

HASIL

Identifikasi Stakeholder dan Tujuan

Analisis stakeholder diawali dengan identifikasi stakeholder dan tujuan, hal mana dilakukan telaah mengenai siapa saja pihak-pihak yang berperan serta apa saja yang menjadi tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing pihak tersebut.

Hasil identifikasi stakeholder diketahui bahwa pihak yang terlibat didaam program puspaga meliputi; Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dan Sekretariat Daerah. Selanjutnya pihak Pemerintah Kecamatan Gubeng, pihak Pemerintah Kelurahan Mojo, pihak berikutnya yakni pihak Akademisi yang meliputi Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Wijaya Putra Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Hangtuah Surabaya, Universitas 45 Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Nahdatul Ulama Surabaya, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Lebih lanjut secara teknis pihak yang terlibat adalah pengurus RW setempat, dalam hal ini Kelurahan Mojo.

Tujuan dari layanan puspaga Balai RW di Kota Surabaya yaitu: 1) Meningkatkan dan mendekatkan akses pelayanan terkait pembelajaran keluarga dan penanganan terhadap permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak kepada masyarakat; 2) Tersedianya layanan gratis bagi keluarga dalam bentuk “one stop service” yaitu layanan satu pintu keluarga *holistic integratif* berbasis hak anak; 3) Tersedianya tempat untuk mendapatkan layanan informasi, konsultasi, dan konseling bagi anak, orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak; 4) Terciptanya ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak.

Hasil telaah dalam identifikasi stakeholder serta tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 2. Hasil Identifikasi Stakeholder dan Tugas Pokok dalam Program Puspaga

No	Stakeholder	Peran	Tingkat Pengaruh	Tingkat Ketergantungan
1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	<p>1. Tugas DP3APPKB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan menyusun (juknis) serta menggalang/mencari dukungan untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW. • Berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, ketua RW/RT dan paguyuban terkait pelaksanaan Puspaga BALAI RW. • Bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Sosial Masyarakat terkait dan Akademisi di tingkat kota, provinsi dan pusat untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan layanan Puspaga BALAI RW. • Menyediakan dokumen administrasi, spanduk, X-Banner dan poster Puspaga BALAI RW • Monitoring, evaluasi atas layanan PUSPAGA Kota Surabaya. Berkoordinasi dengan kecamatan terkait hal - hal sbb : <ul style="list-style-type: none"> - SK PUSPAGA BALAI RW yang ditandatangani oleh Camat (Draft terlampir dalam Juknis) - PT untuk penjadwalan Fasilitator Puspaga BALAI RW 	Tinggi	Tinggi

		<ul style="list-style-type: none"> - Undangan Warga untuk penjadwalan penggiliran Kelas Parenting setiap hari Selasa dan Kamis Pk. 15.00 - 17.00 WIB 		
		<p>2. Tugas Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kecamatan, kelurahan, Ketua RT/RW untuk melakukan layanan Puspaga Rusunawa. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Puspaga. 		
2	Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan menyusun kebijakan, surat keputusan, dan surat perintah tugas piket serta dukungan operasional untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW di kecamatan. • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi atas pelaksanaan Puspaga BALAI RW • Mengundang warga melalui RT/RW untuk mengikuti kelas parenting sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kecamatan • Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Puspaga BALAI RW (draft terlampir). • Menerbitkan Surat Perintah Tugas bagi 3 (tiga) orang Fasilitator PUSPAGA BALAI RW (wajib) dan/atau dengan tambahan personal bergiliran dengan jadwal dan pembagian tugas yang dilampiri rencana kerja atau kegiatan lengkap dengan tema sosialisasi/parenting dan pembelajaran keluarga yang akan dilakukan sesuai dengan juknis Puspaga BALAI RW • Menginstruksikan pada petugas untuk menyampaikan pelaporan kegiatan harian byname per fasilitator PUSPAGA BALAI RW pada link https://bit.ly/puspagarw1 	Rendah	Tinggi
3	Pemerintah Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan kegiatan serta dukungan operasional untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW. • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Puspaga BALAI RW kepada Camat. • Memastikan pelaksanaan Puspaga di wilayahnya masing-masing. 	Rendah	Tinggi
4	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan mahasiswa psikologi atau tenaga profesi layanan (S1/S2/S3) untuk mendampingi pelaksanaan layanan : <ul style="list-style-type: none"> - Konseling / konsultasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) - Sosialisasi / psikoedukasi pembelajaran / parenting keluarga kepada masyarakat berbagai tema. • Melakukan pengembangan Puspaga BALAI RW bersama DP3APPKB 	Tinggi	Rendah

		<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi pelaksanaan ToT Puspaga BALAI RW • Mematrikulasi kegiatan mahasiswa sebagai satuan kredit semester • Berkoordinasi dengan DP3APPKB melakukan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi atas pelaksanaan Puspaga BALAI RW. 		
5	Ketua RW	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan Puspaga di BALAI RW bersama dengan Ketua RW/RT, Kelurahan & Kecamatan • Mempromosikan kegiatan / layanan Puspaga Balai RW • Memfasilitasi pelaksanaan Puspaga RW • Bekerjasama dengan fasilitator atau jejaring melaksanakan puspaga RW. 	Tinggi	Rendah

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Pengelompokan dan Pengkategorian Stakeholder

Setelah dilakukan identifikasi stakeholder, selanjutnya dilakukan pengelompokan dan pengkategorian stakeholder dengan melakukan pemetaan pengaruh dan kepentingan antar stakeholder, maksud dan tujuan dari pengelompokan dan pengkategorian stakeholder ini guna untuk mengetahui stakeholder mana yang berperan sesuai dengan kepentingan yang ada berdasarkan tingkat pengaruh. Pengkategorian dalam penelitian ini di kategori dan di kelompokan ada 3 (tiga) bagian yaitu: 1) Stakeholder Kunci, yang merupakan bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan; 2) Stakeholder Utama (Primer) merupakan stakeholder yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, serta program. Mereka tersebut adalah bagian pihak penentu yang paling utama dalam sebuah aktivitas pengambilan keputusan; 3) Stakeholder Pendukung (Sekunder) adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program, dalam kebijakan atau sebuah proyek atau biasa disebut sebagai stakeholder yang secara langsung terkena dampak suatu kebijakan (subjek).

Berdasarkan hasil analisis stakeholder diperoleh bahwa Stakeholder Kunci adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari DP3APPKB dan Sekertariat Daerah bagian Staff Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai pengaruh paling besar dalam layanan Pusat Pembelajaran Keluarga. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam Melakukan koordinasi dan menyusun (juknis) serta menggalang/mencari dukungan untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW, Mendorong kecamatan, kelurahan, Ketua RT/RW untuk melakukan layanan Puspaga Rusunawa, dan Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Puspaga.

Bentuk pengaruh dari Stakeholder Kunci antara lain: Sebagai penanggung jawab utama sehingga otoritasnya tinggi dalam pelaksanaan program puspaga yang telah disusun; Meningkatkan Legitimasi dari kerjasama antar pihak Pemkot dengan pihak akademisi atau pihak stakeholder diluar Pemerintah Kota; Sebagai petunjuk dan teknis dalam pelaksanaan program puspaga; Mengorganisir pelaksanaan program puspaga; Mendukung penyediaan alokasi dana yang tersedia untuk pelaksanaan program puspaga.

Selanjutnya stakeholder yang termasuk dalam kategori Stakeholder Utama (Primer) yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, serta program, yaitu Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan. Hal ini didasari bahwa Pemerintah Kecamatan,

khususnya bagian staff puspaga yang hanya memiliki kewenangan untuk Koordinasi dan menyusun kebijakan, surat keputusan, dan surat perintah tugas piket serta dukungan operasional untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW di kecamatan, sedangkan Pemerintah Kelurahan khususnya pada bagian Kasie Kasra Kelurahan yang hanya memiliki kewenangan Melakukan koordinasi dan kegiatan serta dukungan operasional untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW.

Bentuk pengaruh Stakeholder Utama (Primer) antara lain: Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Puspaga sesuai dengan lingkup wilayahnya; Melaksanakan petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaan yang telah disusun oleh DP3APPKB agar dapat dioperasionalkan secara optimal; Mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya finansial yang digunakan untuk pelaksanaan program Puspaga Balai RW; Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai ruang lingkup yang menjadi kewenangan.

Stakeholder Akademis dan Ketua RW merupakan Stakeholder Pendukung (Sekunder) yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program, dalam kebijakan atau sebuah proyek atau biasa disebut sebagai stakeholder yang secara langsung terkena dampak suatu kebijakan (subjek). Kepentingan Akademisi dalam hal ini lebih cenderung kepada pemenuhan tugas dari kegiatan magang MSIB yang dimana harus terlibat dalam proses program dan kegiatan yang ada pada Puspaga RW di Kota Surabaya. Peran peran akademisi dalam program ini, yaitu Melakukan pengembangan Puspaga BALAI RW bersama DP3APPKB; dan Mendampingi pelaksanaan ToT Puspaga BALAI RW. Sebaliknya stakeholder Ketua RW mempunyai kepentingan agar seluruh masyarakatnya dapat mengikuti dan mendapatkan hal positif dari program yang di berikan Puspaga. Peran Ketua RW dalam program ini, yaitu Mengkoordinasikan pelaksanaan Puspaga di BALAI RW bersama dengan Ketua RW/RT, Kelurahan & Kecamatan dan Memfasilitasi pelaksanaan Puspaga RW.

Bentuk pengaruh Stakeholder Pendukung (Sekunder), antara lain: Sebagai pelaksana teknis yang mendukung efektivitas program Puspaga Balai RW melalui sosialisasi, edukasi dan publikasi; Mendukung pelaksanaan program melalui pengabdian masyarakat; Ketua RW memiliki peran bertanggung jawab dalam pelaksanaan Puspaga Balai RW pada lingkup RW Dengan demikian kedua stakeholder tersebut tidak dapat mempengaruhi secara langsung pada stakeholder pengambil kebijakan, sehingga apapun keputusan yang ditetapkan terkait kebijakan harus di jalankan sesuai arahan yang ada.

Berikut merupakan tabel dari pengkelompokan dan pengkategorian stakeholder dalam Pusat Pembelajaran Keluarga;

Tabel 3. Pengelompokan dan Pengkategorian Stakeholder Puspaga

Kategori Stakeholder	Stakeholder	Tingkat Pengaruh	Bentuk Pengaruh
Stakeholder Kunci	<ul style="list-style-type: none"> • DP3APPKB • Sekertariat Daerah bagian Staff Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penanggung jawab utama sehingga otoritasnya tinggi dalam pelaksanaan program puspaga yang telah disusun • Meningkatkan Ligitimasi dari kerjasama antar pihak Pemkot dengan pihak akademisi atau pihak stakeholder diluar Pemerintah Kota • Sebagai petunjuk dan teknis dalam pelaksanaan program puspaga • Mengorganisir pelaksanaan program puspaga

Stakeholder Utama (Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan: bagian staff puspaga • Pemerintah Kelurahan : bagian Kasie Kasra Kelurahan 	Cukup Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung penyediaan alokasi dana yang tersedia untuk pelaksanaan program puspaga • Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Puspaga sesuai dengan lingkup wilayahnya • Melaksanakan petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaan yang telah disusun oleh DP3APKB agar dapat dioperasionalkan secara optimal • Mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya finansial yang digunakan untuk pelaksanaan program Puspaga Balai RW • Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai ruang lingkup yang menjadi kewenangan
Stakeholder Pendukung (Sekunder)	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi • Ketua RW 	Cukup Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pelaksana teknis yang mendukung efektivitas program Puspaga Balai RW melalui sosialisasi, edukasi dan publikasi • Mendukung pelaksanaan program melalui pengabdian masyarakat • Ketua RW memiliki peran bertanggung jawab dalam pelaksanaan Puspaga Balai RW pada lingkup RW

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Strategi Pengaturan Stakeholder

Hasil pengelompokan dan pengkategorian stakeholder tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi untuk mendorong berjalannya program Puspaga. Beberapa isu dan konflik kepentingan stakeholder dapat diatasi dengan melakukan penyusunan strategi pengaturan stakeholder. Maksud dari strategi pengaturan stakeholder ini guna untuk Mengatur dan engelola harapan stakeholder serta Menetapkan dan mengelola ekspektasi mungkin merupakan aspek terpenting dari rencana stakeholder, sebab stakeholders yang diinvestasikan dalam proyek dan akan memiliki banyak pendapat tentang bagaimana program tersebut harus dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Reed et al. 2009) bahwa kepentingan yang dimiliki stakeholder tidak statis artinya dapat berubah dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang dalam pembahasan suatu isu.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai satu-satunya stakeholder kunci maka harus mampu melakukan koordinasi dan bersinergi secara efektif dengan stakeholder lainnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memainkan peran sentral sebagai pemrakarsa penyusunan program puspaga di setiap RW yang ada di Kota Surabaya. Namun selama ini fungsi koordinasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berjalan optimal sehingga setiap dilakukan pembahasan regulasi tersebut sering mendapatkan penolakan dari para stakeholder. Sedangkan stakeholder Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan sebagai stakeholder Pendukung (Primer) merupakan stakeholder yang harus

diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam perumusan Program Puspaga tersebut. Bentuk keterlibatan stakeholder tersebut dapat difasilitasi melalui koordinasi antar semua stakeholder dalam satu forum atau secara bilateral antar 2 (dua) stakeholder.

Strategi yang dijalankan oleh stakeholder kunci Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu DP3APPPKB dan Sekertariat Daerah bagian Staff Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada pengimplementasiannya, kekuasaan dan kepentingan aktor mempengaruhi hasil pencapaian yang diinginkan. Dalam hal ini, DP3APPPKB dan Sekertariat Daerah bagian Staff Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki kekuasaan untuk dapat menyebarkan dan melaksanakan kebijakan terkait Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Balai RW dengan dukungan pelaksana program DP3APPPKB dan Sekertariat Daerah bagian Staff Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan penyebaran program tersebut melalui media cetak dan elektronik. Selain itu, upaya juga dilakukan melalui publikasi di sosial media dan telah dilakukan launching aplikasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya pelayanan yang diberikan oleh DP3APPPKB dan Sekertariat Daerah bagian Staff Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

DP3APPPKB pun telah mengupayakan sesi konseling yang berlangsung agar masyarakat lebih aman dan permasalahan yang ada pun teratasi dengan baik. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipaparkan:

1. Adanya sosialisasi terbuka kepada seluruh stakeholder dan masyarakat secara berkala yang dibentuk berdasarkan unsur terkecil dalam wilayah seperti kelurahan dan/atau RW sehingga penyebaran informasi dan pemahaman dapat merata kepada masyarakat.
2. Adanya peran dari pemerintah dapat memberikan serta menciptakan keyakinan bagi masyarakat yang hendak mengakses pelayanan khususnya pada program telekonsultasi Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Balai RW. Hal ini agar masyarakat mengetahui dan memberikan kepercayaan untuk dapat memanfaatkan program.

Strategi ini akan mampu mewujudkan terbitnya program Puspaga yang dapat diterapkan sehingga tujuan untuk Meningkatkan dan mendekatkan akses pelayanan terkait pembelajaran keluarga dan penanganan terhadap permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak kepada masyarakat; Tersedianya layanan gratis bagi keluarga dalam bentuk *“one stop service”* yaitu layanan satu pintu keluarga *holistic integratif* berbasis hak anak; Tersedianya tempat untuk mendapatkan layanan informasi, konsultasi, dan konseling bagi anak, orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak; Terciptanya ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak dapat dicapai dengan baik.

Selanjutnya, stakeholder Akademis dan Ketua RW perlu dilakukan pendekatan secara khusus mengingat stakeholder tersebut yang mempunyai kepentingan yang tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat. Berdasarkan pengamatan selama ini kepentingan Akademis dan Ketua RW terbilang adalah sama. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan adalah Arahan dan pemahaman bahwa program Puspaga ini dapat memberikan value yang lebih baik. Strategi selanjutnya adalah stakeholder kunci harus independen dalam menerima masukan dari stakeholder, khususnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua stakeholder yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini pada dasarnya memiliki hubungan yang dapat berkerja sama, saling berkoordinasi, dan adanya konflik-konflik kepentingan. Oleh karena itu, strategi pengaturan stakeholder ini perlu dijalankan dengan baik oleh stakeholder kunci dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun analisis tabel dari strategi pengaturan pelaksanaan puspaga adalah sebagai berikut;

Tabel 4. Strategi Pengaturan Pelaksanaan Puspaga

Kategori Stakeholder	Stakeholder	Strategi Pelaksanaan
Stakeholder Kunci	<ul style="list-style-type: none"> • DP3APPPKB • Sekertariat Daerah bagian Staff Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan menyusun (juknis) serta menggalang/mencari dukungan untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kecamatan, kelurahan, Ketua RT/RW untuk melakukan layanan Puspaga Rusunawa. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Puspaga.
Stakeholder Utama (Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan: bagian staff puspa • Pemerintah Kelurahan : bagian Kasie Kasra Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan menyusun kebijakan, surat keputusan, dan surat perintah tugas piket serta dukungan operasional untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW di kecamatan • Melakukan koordinasi dan kegiatan serta dukungan operasional untuk pelaksanaan Puspaga BALAI RW.
Stakeholder Pendukung (Sekunder)	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi • Ketua RW 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengembangan Puspaga BALAI RW bersama DP3APPKB; dan Mendampingi pelaksanaan ToT Puspaga BALAI RW • Mengkoordinasikan pelaksanaan Puspaga di BALAI RW bersama dengan Ketua RW/RT, Kelurahan & Kecamatan dan Memfasilitasi pelaksanaan Puspaga RW.

Sumber: Diolah Penulis, 2024

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa stakeholder yang terlibat dalam Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Kota Surabaya meliputi DP3APPKB, Sekda, pihak Kecamatan, pihak Kelurahan, pihak RW, serta akademisi. Tugas pokok dan fungsi telah ditentukan sesuai dengan masing-masing pihak yang terlibat.

Pihak yang berperan dapat digolongkan dalam kategori stakeholder kunci, stakeholder utama, dan stakeholder pendukung. Langkah strategi stakeholder kunci dapat berupa penentuan kebijakan, pengorganisasian, penyediaan sumber daya, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan pada stakeholder utama dan stakeholder pendukung meliputi koordinasi, sosialisasi, edukasi, publikasi, alokasi sumber daya, serta melaksanakan teknis kegiatan yang menjadi muatan dalam program puspa.

Dalam upaya berjalanya program Puspaga di Kota Surabaya, perlu diterapkan strategi yang mendorong terjalinnya hubungan antar stakeholder saling berkerjasama, saling berkoordinasi dalam menyelesaikan konflik kepentingan. Implementasi strategi tersebut harus dilakukan sepenuhnya oleh stakeholder kunci. Oleh karena itu, peran stakeholder kunci perlu lebih ditingkatkan sehingga regulasi tersebut dapat segera diterbitkan. Di samping itu, stakeholder kunci juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala keefektifan dari implementasi program tersebut apabila telah ditetapkan.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi Dalam upaya berjalanya program Puspaga di Kota Surabaya, yaitu: 1) Libatkan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Puspaga. Dapatkan masukan mereka untuk memahami kebutuhan dan harapan secara lebih baik; 2) Identifikasi dan prioritaskan kebutuhan masyarakat setempat. Sesuaikan program Puspaga dengan kebutuhan yang mendesak dan relevan di Kota Surabaya; 3) Bangun kemitraan dengan

organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mendukung keberlanjutan program Puspaga; 4) Sediakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai isu-isu yang relevan dengan program Puspaga, seperti pendidikan kesehatan, pengelolaan lingkungan, atau keterampilan pekerjaan; 5) Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak program secara berkala. Gunakan hasilnya untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Ferdy, and Hartuti Purnaweni. 2017. "Analisis Stakeholders Dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* 6(2): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16208>.
- Artha, Hidayatul Fajri, Dini Akmal, and Pratiwi Nurhabibi. 2019. "Analisis Stakeholder Dalam Konflik Revitalisasi Emplasement Stasiun Kereta Api." *Jurnal Kebijakan Publik* 10(2): 61.
- Cheng, Philip, Carla C J M Millar, and Chong Ju Choi. 2006. "Organizational Change in Stakeholder Business Systems: The Role of Institutions." *Journal of Organizational Change Management* 19(3): 383–92.
- Eyben, Rosalind. 2003. "Mainstreaming the Social Dimension into the Overseas Development Administration: A Partial History." *Journal of International Development* 15(7): 879–92.
- Filia, Priska Grace, and Laila Khalid Alfirdaus. 2020. "Analisis Stakeholder Dalam Program CSR-BUMN: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang." *Journal of Politic and Government Studies* 3(9): 1–13.
- Grimble, Robin. 1998. "Stakeholder Methodologies in Natural Resource." *Socio-economic methodologies best practice guidelines*: 12. <http://www.nri.org/publications/bpg/bpg02.pdf>.
- Ilham, Qori Pebrial, Herry Purnomo, and Tri Nugroho. 2016. "Stakeholder and Social Network Analyses towards Multistakeholder Forest Management in Solok District, West Sumatera." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 21(2): 114–19.
- Mushove, Patrick, and Coleen Vogel. 2005. "Heads or Tails? Stakeholder Analysis as a Tool for Conservation Area Management." *Global Environmental Change* 15(3): 184–98.
- Reed, Mark S. et al. 2009. "Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management." *Journal of Environmental Management* 90(5): 1933–49.
- Sugiyono, F X. 2017. *4 Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi Dan Penerapan*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sugiyono, Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D." *Bandung: Alfabeta*.
- Widodo, Muji Listyo, Rinekso Soekmadi, and Hadi Susilo Arifin. 2018. "Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 8(1): 55–61.